PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM, BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN PERBANKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2018

SKRIPSI

Oleh:

SELLY NURSAFITRI

NIM: G71216080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM, BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN PERBANKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2018

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu

Ekonomi

Oleh:

Selly Nursafitri

NIM: G712176080

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Ilmu Ekonomi

Surabaya

2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nam	: Selly Nursafitri
NIM	: G71216080
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi	: Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah dan Pinjaman Perbankan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2013-2018

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

Selly Nursafitri

NIM. G71216080

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Selly Nursafitri NIM. G71216080 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Maret 2020

Pembimbing,

Ana Toni Roby Candra Yudha, SEI, M.SEI

NUP. 201603311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Selly Nursafitri NIM. G71216080 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 16 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Ana Toni Roby Candra Yudha, SEI, M.SEI
NUP. 201603311

Penguji II,

Deasy Tantriana, MM
NIP. 198312282011012009

Penguji III,

Abdul Hakim, M.EI
NIP. 197008042005011003

Penguji IV,

Betty Silfia Ayu Utami, SE, M.SE
NIP. 198706102019032019

Surabaya, 19 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Ali Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Selly Nursafitri
NIM : G71216080
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
E-mail address : sellynursafitri27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah dan Pinjaman Perbankan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Tahun 2013-2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Bojonegoro, 31 Agustus 2020

Penulis

(Selly Nursafitri)
nama terang dan tanda tangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul ―Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah dan Pinjaman Perbankan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2013-2018‖ ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apakah inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2013-2018.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *random effect*. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, dengan sumber data yang berasal dari BPS dan Disnakertrans Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur dengan nilai sig 0.4622, variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur dengan nilai sig 0.1010, variabel belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur dengan nilai sig 0.0063, sedangkan pinjaman perbankan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur dengan nilai sig 0.0000. Secara bersama-sama variabel inflasi, upah minimum provinsi, belanja daerah dan pinjaman perbankan berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur, dengan nilai sig 0.000195.

Penelitian ini menjelaskan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur adalah belanja daerah, saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini diperlukan suatu kebijakan dengan lebih meningkatkan peran belanja daerah di berbagai sektor. Serta bagi lembaga perbankan agar lebih selektif lagi dalam memberikan kredit.

Kata Kunci: Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah, Pinjaman Perbankan dan Tingkat Pengangguran Terbuka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN.....iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL.....xi

DAFTAR GAMBAR.....xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....14

C. Tujuan Penelitian.....15

D. Kegunaan Hasil Penelitian.....15

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....17

A. Landasan Teori.....17

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....24

C. Kerangka Konseptual.....31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hipotesis.....33

BAB III METODE PENELITIAN.....34

A. Jenis Penelitian.....34

B. Waktu dan Tempat Penelitian.....34

C. Populasi dan Sampel Penelitian.....35

D. Variabel Penelitian.....35

E. Definisi Operasional.....36

F. Data dan Sumber Data.....38

G. Uji Validitas dan Reliabilitas.....38

H. Teknik Pengumpulan Data.....40

I. Teknik Analisis Data.....41

BAB IV HASIL PENELITIAN.....50

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....50

B. Analisis Data.....58

BAB V PEMBAHASAN.....67

A. Pengaruh Secara Simultan Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah dan Pinjaman PerbankanTerhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....67

B. Pengaruh Secara Parsial Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah dan Pinjaman Perbankan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Variabel Yang Paling Berpengaruh Antara Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah dan Pinjaman Perbankan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....75

BAB VI PENUTUP.....77

A. Kesimpulan.....77

B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA.....80

LAMPIRAN.....83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.....7

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur.....8

Tabel 1.3 Tingkat Inflasi di Jawa Timur.....9

Tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi di Jawa Timur.....10

Tabel 1.5 Belanja Daerah di Jawa Timur.....11

Tabel 1.6 Pinjaman Perbankan di Jawa Timur.....12

Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka 8 Kab/Kota di Jawa Timur.....52

Tabel 4.2 Inflasi 8 Kab/Kota di Jawa Timur.....53

Tabel 4.3 UMK 8 Kab/Kota di Jawa Timur.....54

Tabel 4.4 Belanja Daerah 8 Kab/Kota di Jawa Timur.....55

Tabel 4.5 Pinjaman Perbankan 8 Kab/Kota di Jawa Timur.....56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur.....49

Gambar 4.2 Hasil Uji Chow.....57

Gambar 4.3 Hasil Uji Hausman.....58

Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas.....59

Gambar 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....60

Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....60

Gambar 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....61

Gambar 4.8 Penentuan Autokorelasi.....61

Gambar 4.9 Hasil Regresi.....62

Gambar 5.1 Kurva Philis.....68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi dan pengaruh uang terhadap kegiatan dalam perekonomian. Secara umum, kegiatan ekonomi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional.[1] Apabila kestabilan dalam perekonomian terganggu, maka peran ekonomi moneter dibutuhkan untuk kembali menstabilkan perekonomian.

Perekonomian yang stabil akan lebih disukai dibandingkan dengan perekonomian yang mengalami gejolak. Kestabilan menjadi penting karena kondisi yang stabil akan menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan dunia usaha.[2] Dengan kestabilan ekonomi ini diharapkan semakin besar peluang dalam meningkatkan produksi, selain membantu untuk meningkatkan produksi juga dapat membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar keinginan untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan mengakibatkan terjadinya

[1] Jimmy Hasoloan, ―Ekonomi Moneter‖, Ekonomi Moneter dan Perbankan (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 1.
[2] Azwar Anas, ―Analisis Kebijakan Moneter Dalam Menstabilkan Inflasi dan Pengangguran di Indonesia‖ (Skripsi--Institusi Pertanian Bogor, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan kesempatan kerja. Sehingga besarnya tingkat pengangguran, sedikit demi sedikit dapat ditekan atau dikurangi jumlahnya.

Pemerintah berperan penting dalam mengatasi masalah pengangguran melalui dua kebijakan, diantaranya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menurut Alexius dan Holmlund (2007) dalam hasil studinya menyatakan bahwa kegiatan moneter itu mampu memainkan peranan yang sangat penting dalam fluktuasi jumlah pengangguran. Sedangkan menurut Battaglini dan Coate (2011) menyatakan bahwa kebijakan fiskal memiliki fungsi penting dalam hal mengurangi pengangguran. Teori lain juga menyatakan bahwa pengangguran juga dipengaruhi oleh inflasi, kebijakan moneter melalui suku bunga dan jumlah uang yang beredar, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dan pajak, serta pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan dari kebijakan tersebut.[3]

Adapun jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2019 adalah 2.165,1 (dalam triliun rupiah). Beberapa terobosan dan kebijakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2019 di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara serta kemandirian anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini dilakukan melalui penguatan bidang kesehatan diantaranya program penurunan stunting terintegrasi, penajaman anggaran pendidikan, penguatan program keluarga harapan, *tax expenditure*, *pooling fund* bencana alam, percepatan

[3] Holifah, ―Analisis Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia‖ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU serta percepatan pembangunan pada tingkat kelurahan melalui DAU tambahan.[4]

Asumsi dasar dalam ekonomi makro APBN 2019, hanya nilai tukar rupiah dan *lifting* minyak yang mengalami perubahan dari asumsi yang diajukan pemerintah di RAPBN 2019. Nilai tukar disesuaikan secara cepat untuk mengantisipasi kondisi global agar APBN menjadi lebih realistis dan kredibel dari Rp 14.400 (RAPBN) menjadi Rp 15.000 (APBN). Tema dari kebijakan fiskal yang akan dijalankan pemerintah di tahun 2019 adalah ―APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia‖. Kebijakan pokok yang akan dijalankan oleh pemerintah diantaranya pertama, mobilitas pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kedua, belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan desentralisasi fiskal. Ketiga, efisiensi serta inovasi pembiayaan akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.[5] Program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai negara berkembang sudah cukup efisien dengan pembiayaan utama dalam anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur agar kualitas sumber daya manusia meningkat. Jika pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat, maka dapat diasumsikan pendapatan akan meningkat, sebab peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu mempengaruhi pendapatan masyarakatnya, sehingga kesejahteraan

[4] Direktorat Penyusunan APBN, ―Informasi APBN 2019‖, dalam https://www.kemenkeu.go.id/media/11213/buku-informasi-apbn-2019.pdf, diakses pada November 2019.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat bisa meningkat pula dan jumlah angka pengangguran dapat berkurang.

Besarnya APBN 2019 untuk Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 58,63 (dalam triliun rupiah). Angka ini menunjukkan adanya penurunan 2,37% dibandingkan tahun 2018, dengan penurunan terbesar terletak pada belanja barang dan belanja modal. Anggaran penerimaan APBN untuk Provinsi Jawa Timur bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah yang dikelola oleh kantor-kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak di Jawa Timur. Anggaran belanja untuk wilayah Jawa Timur disalurkan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi atau kab/kota. Belanja pemerintah pusat ditujukan untuk membiayai gaji pegawai kementrian atau instansi pemerintah pusat yang berada di Jawa Timur, proyek-proyek infrastruktur strategis yang direncanakan oleh pemerintah pusat untuk wilayah Jawa Timur, serta program-program kementerian yang dilaksanakan di Jawa Timur.[6]

Alokasi APBN di Jawa Timur ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlihat dari alokasi APBN yang menunjukkan bahwa belanja APBN Jawa Timur difokuskan untuk pelayanan umum sebesar 27,01% dari total anggaran, pendidikan sebesar 23,78%, serta ekonomi sebesar 15,71%. Peningkatan alokasi anggaran untuk DAK fisik dan dana desa juga

[6] Bank Indonesia, ―Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur 2019‖, dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jatim/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2019.aspx, diakses pada November 2019, 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan infrastrukur, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.[7]

Permasalahan-permasalahan yang sering dialami dalam negara berkembang adalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, serta tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran. Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah yang tidak hanya menghampiri negara berkembang, tetapi juga negara maju seperti Amerika Serikat (AS). Tercatat 15 juta tenaga kerja atau sekitar 8% lebih menganggur. Pemerintah sendiri selama ini terus fokus pada program pembangunan yang diharapkan mampu menanggulangi kedua persoalan ini. Meskipun hasilnya memang belum sepenuhnya memuaskan berbagai pihak.[8]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriana (2017), menunjukkan hasil bahwa UMK berpengaruh signifikan positif terhadap pengangguran, pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif sedangkan PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di Daerah Istimewa Yogyakarta.[9] Penelitian lain dilakukan oleh Reni (2016), menunjukkan bahwa beban/tanggungan penduduk, upah minimum kota dan inflasi secara simultan atau bersamaan berpengaruh

---

[7] Bank Indonesia, ―Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur 2019‖, dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jatim/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2019.aspx, diakses pada November 2019, 36.

[8] Ragiman, ―Masalah Pengangguran Dalam Kemiskinan‖, dalam https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20100811092835269301854, diakses pada November 2019.

[9] Febriana Nur Rahmawati, ―Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2015)‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2017), xiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap tingkat pengangguran terbuka di kota-kota Provinsi Jawa Tengah. PDRB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah, beban/tanggungan penduduk berpengaruh positif signifikan, upah minimum kota berpengaruh negatif signifikan, dan inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kota-kota Provinsi Jawa Tengah.[10] Penelitian-peneitian ini menjadi referensi sekaligus menarik perhatian dari penulis untuk menyusun penelitian yang saat ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur terkait dengan permasalahan pengangguran.

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan data tingkat pengangguran dapat diketahui kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya dapat berkembang dengan cepat atau lambat bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan, sehingga penyerapan tenaga kerja cukup kecil presentasinya. Hal ini terjadi karena semakin sedikit lapangan pekerjaan maka tenaga kerja yang diserap juga semakin sedikit pula, begitu sebaliknya.[11]

---

[10] Reni Widiyati, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-Kota Provinsi Jawa Tengah‖ (Naskah Publikasi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

[11] M. Wardiansyah, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-Provinsi Se-Sumatera)‖, *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* No.1, Vol.5 (Januari-April 2016), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengangguran juga menjadi salah satu masalah yang dialami oleh berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak dari pengangguran diantaranya turunnya pertumbuhan ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Permasalahan pengangguran ini dapat dibuktikan dengan melihat data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam persen)	
	Bulan Februari	Bulan Agustus
2013	5,88%	6,17%
2014	5,70%	5,94%
2015	5,81%	6,18%
2016	5,50%	5,61%
2017	5,33%	5,50%
2018	5,13%	5,34%

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia[12]

Berdasarkan data yang tercatat diatas, diperoleh informasi bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia nilainya naik turun atau biasa disebut dengan fluktuatif. Nilai dari tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan belum adanya kemajuan dalam mengentaskan tingkat pengangguran atau dengan kata lain belum terlihat adanya penurunan secara signifikan pada nilai tingkat pengangguran.

Provinsi-provinsi di Indonesia juga mengalami permasalahan serupa, termasuk Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang belum bisa lepas dari permasalahan yang umumnya menjerat negara berkembang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik terkait permasalahan tingkat

[12] Badan Pusat Statistik, (Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi 1986-2018), dalam https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2018.html, diakses pada November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2018 diantaranya:

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Jember	3,94	4,64	4,77	5,21	5,16	4,09
Kab Banyuwangi	4,65	7,17	2,55	4,43	3,07	3,67
Kab Sumenep	2,56	1,01	2,07	2,00	1,83	1,79
Kota Kediri	7,92	7,66	8,46	8,22	4,68	3,63
Kota Malang	7,73	7,22	7,28	6,91	7,22	6,79
Kota Probolinggo	4,48	5,16	4,01	3,96	3,42	3,64
Kota Madiun	6,57	6,93	5,10	5,12	4,26	3,85
Kota Surabaya	5,32	5,82	7,01	7,29	5,98	6,12

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka 8 Kab/Kota di Jawa Timur (dalam persen)[13]

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur nilainya hampir sama dengan Indonesia, yakni keduanya sama-sama fluktuatif. Mengalami kenaikan atau penurunan pada waktu-waktu tertentu. Data pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2018 juga belum menunjukkan adanya penurunan secara signifikan. Keadaan ini menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan tingkat pengangguran terbuka.

Pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan (dikarenakan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan), serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan akan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

[13] Tingkat Pengangguran Terbuka, dalam https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/11/05/432/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-2001---agustus-2018.html, diakses pada Februari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, selain tingkat pengangguran terbuka, inflasi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2018 nilainya juga fluktuatif. Terbukti dengan data berikut:

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Jember	7,21	7,52	2,31	1,93	3,52	2,95
Kab Banyuwangi	7,10	6,59	2,15	1,91	3,17	2,04
Kab Sumenep	6,62	8,04	2,62	2,19	3,40	2,82
Kota Kediri	8,05	7,49	1,71	1,30	3,44	1,97
Kota Malang	7,92	8,14	3,32	2,62	3,75	2,98
Kota Probolinggo	7,98	6,79	2,11	1,53	3,18	2,18
Kota Madiun	7,52	7,40	2,75	2,25	4,78	2,71
Kota Surabaya	7,52	7,90	3,43	3,22	4,37	3,03

Tabel 1.3 Tingkat Inflasi 8 Kab/Kota di Jawa Timur (dalam persen)[14]

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya angka inflasi dari tahun 2013 hingga tahun 2018 mengalami fluktuatif. Kenaikan terjadi di tahun 2017, sedangkan penurunan terjadi di tahun 2015, 2016 serta 2018. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Malang pada tahun 2014 yang mencapai 8,14 dan inflasi terendah terjadi di Kota Kediri tahun 2016 sebesar 1,30.

Inflasi menjadi faktor yang sangat penting, sebab semakin tinggi tingkat inflasi maka pertumbuhan ekonomi disuatu daerah akan mengalami penurunan. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Tinggi rendahnya inflasi juga memberi dampak pada naik turunnya produksi. Jika inflasi disebabkan oleh permintaan agregat maka sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa

[14] Laju Inflasi, dalam https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=indikator+ekonomi&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan, diakses Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenaikan jumlah barang yang diminta akan menaikkan harga barang tersebut. Sehingga ketersediaan barang atau jasa menjadi terbatas.[15]

Hal ini sejalan dengan pendapat A.W. Philips yang memberikan gambaran bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Philips mengasumsikan bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Jika permintaan naik, maka harga juga akan ikut naik, ini berarti keduanya memiliki hubungan positif. Tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen melakukan peningkatan kapasitas produksinya dengan cara menambah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output. Akibat dari peningkatan harga-harga (inflasi) maka permintaan tenaga kerja juga akan meningkat, sehingga tingkat pengangguran berkurang.[16]

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Jember	1.091	1.270	1.460	1.629	1.763	1.916
Kab Banyuwangi	1.086	1.240	1.426	1.599	1.730	1.881
Kab Sumenep	965	1.090	1.253	1.398	1.513	1.645
Kota Kediri	1.128	1.165	1.339	1.494	1.617	1.758
Kota Malang	1.340	1.587	1.882	2.099	2.272	2.470
Kota Probolinggo	1.103	1.250	1.437	1.603	1.735	1.886
Kota Madiun	953	1.066	1.250	1.394	1.509	1.640
Kota Surabaya	1.740	2.200	2.710	3.045	3.296	3.583

Tabel 1.4 Upah Minimum 8 Kab/Kota di Jawa Timur (dalam ribu rupiah)[17]

Selain inflasi, tingkat upah juga menjadi faktor penting dalam perekonomian. Kenaikan upah akan diikuti dengan turunnya tenaga kerja yang

[15] Dita Dewi Kuntiarti, ‗Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 2-3.
[16] Dania Safia Safitri, ‗Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009‖ (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2011), 14.
[17] UMK Kab/Kota, dalam http://disnakertrans.jatimprov.go.id/category/umk/, diakses Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Sebaliknya, dengan turunnya upah maka akan diikuti dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap memiliki hubungan timbal balik dengan upah. Upah berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi upah yang ditetapkan, akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi. Akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang mengakibatkan pada tingginya pengangguran.[18] Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan besarnya nilai upah minimum di Jawa Timur yang mengalami peningkatan mulai dari 2013 hingga 2018.

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Jember	2.347	2.464	3.083	2.979	3.558	3.775
Kab Banyuwangi	1.886	2.299	2.741	3.095	2.776	3.009
Kab Sumenep	1.421	1.607	1.958	2.048	2.059	2.230
Kota Kediri	871	979	1.120	1.484	1.269	1.286
Kota Malang	1.486	1.602	1.803	1.710	1.813	2.063
Kota Probolinggo	665	778	888	911	957	1.016
Kota Madiun	775	853	877	1.031	954	1.089
Kota Surabaya	5.052	7.049	6.490	7.153	7.912	9.117

Tabel 1.5 Belanja Daerah 8 Kab/Kota di Jawa Timur (dalam juta rupiah)[19]

Ditinjau dari segi belanja daerah, pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan untuk aktivitas yang produktif akan mengakibatkan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah itu sendiri. Ketika pengeluaran pemerintah tinggi dan aktivitas ekonomi pada suatu daerah semakin kompleks,

[18] Tengkoe Sarimuda, –Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2007-2011‖, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* No.2, (Agustus 2014), 108.

[19] Belanja Daerah Kab/Kota, dalam https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan, diakses pada Februari 20120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan kesempatan kerja akan semakin tinggi pula, dan jumlah pengangguran bisa ditekan.[20] Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 kab/kota yang memiliki belanja daerah tertinggi adalah Kota Surabaya dan yang terendah adalah Kota Probolinggo. Hingga tahun 2018 keadaannya masih sama dimana Kota Surabaya masih menduduki wilayah yang memiliki belanja daerah tertinggi dan Kota Probolinggo masih menduduki daerah yang memiliki belanja daerah terendah. Secara keseluruhan belanja daerah dari Kabupaten Sumenep dan Kota Probolinggo mengalami kenaikan secara terus menurus dari tahun 2013-2018. Sedangkan belanja daerah Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, dan Kota Surabaya nilainya fluktuatif.

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Jember	4.405	5.023	5.266	5.569	6.610	7.689
Kab Banyuwangi	4.007	5.311	6.171	6.629	6.978	8.787
Kab Sumenep	1.016	1.117	1.181	1.339	1.524	1.958
Kota Kediri	9.101	1.2461	13.777	13.498	10.239	7.086
Kota Malang	7.339	8.453	7.657	8.754	10.286	10.540
Kota Probolinggo	1.265	1.395	1.347	1.378	1.356	1.509
Kota Madiun	1.289	1.322	1.608	1.596	1.919	1.886
Kota Surabaya	100.400	113.742	125.320	134.084	143.535	146.761

Tabel 1.6 Pinjaman Perbankan 8 Kab/Kota di Jawa Timur (dalam ribu rupiah)[21]

Tinjauan lain dari segi pinjaman perbankan, pinjaman perbankan Provinsi Jawa Timur nilainya fluktuatif. Tidak ada peningkatan atau penurunan secara signifikan dari tahun 2013-2018 terkait pinjaman perbankan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur diatas. Baik orang, perusahaan, daerah maupun negara secara praktiknya tidak dapat terlepas dari pinjam

[20] Febriana Nur Rahmawati, ―Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di D.I Yogyakarta‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2017), 2.
[21] Pustaka Cetak Badan Pusat Statistik Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjam. Tidak hanya urusan bisnis dimana pinjaman digunakan dalam hal modal usaha, tetapi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk konsumtif, peran pinjaman juga sangat penting. Konsep ini juga berlaku dalam tatanan keuangan suatu daerah. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka perbankan memberikan pinjaman kepada sektor swasta dalam bidang lapangan usaha. Selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga mampu mengurangi jumlah pengangguran dari adanya lapangan pekerjaan yang baru.

Permasalahan pengangguran yang terjadi disebabkan karena tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, kurangnya keahlian dari para pekerja serta pilihan seseorang untuk tetap menganggur. Melihat situasi ini, pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengentaskan permasalahan tersebut, demi kemajuan pertumbuhan ekonomomi daeranya. Peran pendidikan, industri besar dan kecil, serta sosialisasi perlu juga diikut sertakan atau jika memungkinkan lebih ditingkatkan lagi untuk membantu dalam mengurangi persoalan terkait pengangguran.[22]

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan serta mengikuti pola yang tidak mudah untuk dipahami.[23] Pengangguran dapat menimbulkan masalah lain seperti kriminalitas,

[22] Riska Framita, ―Analisis Pengangguran di Indonesia‖, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.1,(Desember 2016), 88.
[23] Reni Widiyati, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-Kota Provinsi Jawa Tengah‖ (Naskah Publikasi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemiskinan bahkan gangguan kesehatan. Disisi lain, pengangguran juga menjadi salah satu tolak ukur ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan permasalahan pengangguran yang belum menemukan titik terang hingga saat ini. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinajaman perbankan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Dengan demikian peneliti membuat penelitian berjudul ‒Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah dan Pinjaman Perbankan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Pada Tahun 2013-2018‖.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur secara simultan pada tahun 2013-2018?
2. Apakah inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan berpengaruh terhadap tingkat penangguran terbuka di Jawa Timur secara parsial pada tahun 2013-2018?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Manakah diantara inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2013-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur secara simultan pada tahun 2013-2018.
2. Mengetahui pengaruh inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur secara parsial pada tahun 2013-2018.
3. Mengetahui diantara inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan, yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2013-2018.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun pembaca terkait pentingnya permasalahan pengangguran terbuka serta pengaruh inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2013-2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pengambil Kebijakan

Sebagai informasi atau bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga terkait, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menentukan atau mengambil kebijakan.

b. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini, diharapkan mampu menambah khasanah ilmu ekonomi serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

   a. Teori Pengangguran dan Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin bekerja, akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan.[24] Pengangguran jenisnya banyak sekali, diantaranya adalah pengangguran menurut lamanya waktu kerja yang dikategorikan menjadi beberapa, salah satunya adalah pengangguran terbuka.

Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang terjadi dimana situasi seseorang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan karena orang sulit untuk mencari pekerjaan. Biasanya faktor yang menjadi pemicu adalah lapangan pekerjaan yang tersedia jumlahnya terbatas sehingga orang benar-benar menganggur dan tidak bekerja sama sekali orang sulit memperoleh pekerjaan.[25]

Pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan (dikarenakan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan), serta mereka yang sudah

[24] Naf'an, Ekonomi Makro (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 131.
[25] Ibid, 135-136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki pekerjaan akan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

2. Inflasi

a. Teori Inflasi

Inflasi secara umum adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Definisi lain menurut Raharja dan Manurung (2004), inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan terjadi secara terus menerus. Sedangkan menurut Sukirno (2004), inflasi merupakan kenaikan terkait harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar.[26]

b. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran

Hubungan antara inflasi dengan pengangguran mulai menarik perhatian para ekonom pada akhir tahun 1950-an. A.W. Philips dalam tulisannya yang berjudul *The Relation Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rate in the United Kingdom*, dimuat dalam Jurnal Economica edisi bulan November 1985 halaman 285-500. Isinya terkait dengan hubungan yang sistematik antara inflasi dengan pengangguran yang terjadi di Inggris.[27]

Teori Philips menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat persentase pengangguran.

[26] Naf'an, Ekonomi Makro (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 109.
[27] Ibid, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika terjadi depresi di Amerika Serikat pada tahun 1929, terjadi inflasi yang lebih tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang lebih tinggi pula. Berdasarkan dari data tersebut, A.W. Philips mengamati adanya hubungan antara inflasi dan pengangguran. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa ada kaitan erat antara inflasi dengan pengangguran, jika inflasi tinggi maka tingkat pengangguran akan rendah.[28]

3. Upah Minimum Provinsi

a. Teori Upah

Upah didefinikan sebagai pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja dalam bentuk uang. Pendapatan yang dimaksud bukan hanya dari komponen gaji, akan tetapi juga lemburan dan tunjangan lainnya yang diperolehnya secara rutin (BPS, 2008). Pendapatan yang layak dapat diwujudkan melalui kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah yang dilihat dari kebutuhan hidup yang layak (Sastrohadiwiryo, 2003).[29]

Upah minimum yang dimaksud adalah upah yang paling rendah yang boleh diberikan atas balas jasa perusahaan kepada para pekerjanya. Upah yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja dapat dibedakan menjadi upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada para pekerja sebagai balas jasa atas tenaga fisik maupun mental yang telah digunakan untuk proses produksi.

[28] Dania Safia Safitri, ‒Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009‖ (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2011), 33.
[29] Febriana Nur Rahmawati, ―Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di D.I Yogyakarta‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2017), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan upah riil merupakan upah yang diukur dari seberapa besar nilai upah tersebut dapat digunakan untuk membeli barang ataupun jasa yang dibutuhkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[30]

Dalam menentukan kebijakan terkait upah minimum, pemerintah menjadikan teori kekakuan upah sebagai landasannya. Pada teori ini, dijelaskan bahwa nilai upah tidak bisa fleksibel dalam artian nilai upah tidak bisa beruba-ubah melakukan penyesuaian hingga supply tenaga kerja sama dengan demand tenaga kerja. Hal ini menyebabkan nilai upah minimum berada di atas keseimbangan pasar tenaga kerja (Nugroho, 2013).[31]

b. Hubungan Upah dengan Pengangguran

Dalam teori ekonomi makro menyebutkan bahwa pengangguran berhubungan erat dengan mereka yang hanya mau bekerja pada tingkat upah keseimbangan yang berlaku.[32]

Dua hal yang berbeda dalam teori ini adalah menurut versi Klasik, tingkat upah adalah fleksibel. Sedangkan menurut Keynesian, menyatakan bahwa tingkat upah uang fleksibel naik tetapi tegar turun. Implikasi kebijakan pengangguran terbuka untuk kedua versi ini juga berbeda. Menurut Klasik, fleksibilitas harga dan upah menjamin perekonomian selau berada pada tingkat output kesempatan kerja penuh tanpa pengangguran, serta perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

[30] Febriana Nur Rahmawati, ―Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di D.I Yogyakarta‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2017), 14-15.
[31] Ibid, 15.
[32] Faried Wijaya M, Ekonomi Makro Aneka Model Baku (Yogyakarta: BPFE), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Keynesian, ketegaran upah menyebabkan pengangguran terpaksa dan hanya bisa ditanggulangi dengan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk memulihkan keadaan depresi yang menurutnya adalah akibat dari kurangnya pengeluaran atau permintaan agregat.[33]

Tingkat upah berpengaruh sangat besar terhadap pengangguran, tingkat upah digunakan untuk menghitung penerimaan yang layak bagi pekerja guna memenuhi kehidupannya. Dalam ekonomi konvensional dijelaskan bahwa tingkat upah bisa meningkatkan produktivitas pekerja dan mengurangi pengangguran. Dengan ditetapkannya UMK, perusahaan akan lebih selektif dalam menerima tenaga kerja baru. Tenaga kerja yang telah menetapkan tingkat upahnya pada tingkat tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan berada dibawah tingkat upah yang dia tetapkan maka orang tersebut akan menolak untuk menerima upah tersebut dan pada akhirnya tetap menganggur.[34]

Samuelson (1997) menyatakan bahwa peningkatan upah akan menimbulkan dua efek yang bertentangan dengan penawaran tenaga kerja. Pertama efek substitusional yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterima pada tiap jamnya lebih tinggi. Kedua, efek pendapatan yang justru mempengaruhi segi sebaliknya, tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih

[33] Faried Wijaya M, Ekonomi Makro Aneka Model Baku (Yogyakarta: BPFE), 141-142.
[34] Febriana Nur Rahmawati, ―Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di D.I Yogyakarta‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2017), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli.[35]

4. Belanja Daerah

a. Teori Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Halim (2002) dapat diartikan sebagai bentuk arus kas keluar yang mengakibatkan berkurangnya jumlah ekuitas dana yang dimiliki, kecuali yang berhubungan dengan penyaluran kepada para ekuitas dana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian pada suatu daerah.[36]

Belanja daerah dapat dibedakan menjadi dua, ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.[37]

b. Hubungan Belanja Daerah dengan Pengangguran

Belanja daerah dapat menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor perekonomian lain. *Multiplier effect* akan semakin besar jika belanja yang dilakukan untuk kegiatan produktif. Hal ini disebabkan ketika belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengalami

[35] Shaira Riri Valentine, ―Pengaruh Inflasi, UMR, Jumlah Pariwisata dan PDRB Terhadap Pengangguran di DIY Tahun 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2018).
[36] Febriana Nur Rahmawati, ―Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di D.I Yogyakarta‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2017), 15.
[37] Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenaikan maka akan menstimulus kegiatan perekonomian dan mampu menciptakan *multiplier effect* yang kemudian akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut.[38]

5. Pinjaman Perbankan

a. Teori Pinjaman Perbankan

Pinjaman perbankan yang dimaksud adalah pinjaman yang diberikan oleh bank. Definisi pinjaman yang berikan merupakan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam bentuk rupiah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia.[39]

Kategori pinjamannya adalah berdasarkan lapangan usaha yang meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan,

[38] Febriana Nur Rahmawati, ―Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di D.I Yogyakarta‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2017), 17.
[39] Bank Indonesia, dalam https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/seki/Documents/5_Pinjaman%20yang%20diberikan_Indo.pdf, diakses pada Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan lainnya, jasa-jasa lainnya.[40]

b. Hubungan Pinjaman Perbankan dengan Pengangguran Terbuka

Pinjaman perbankan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR kepada sektor swasta domestik berdasarkan lapangan usaha. Hubungannya dengan tingkat pengangguran terbuka adalah ketika usaha yang dilakukan meningkat karena adanya pinjaman yang didapatkan maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat pula. Pesatnya peningkatan lapangan usaha akan memberikan dampak positif bagi tingkat pengangguran. Ketika lapangan usaha banyak dan berkembang maka tingkat pengangguran akan berkurang jumlahnya.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Dita Dewi Kuntiarti (2017) dengan penelitiannya yang berjudul ‒Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2010-2015‖ dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2015, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2015, dan kenaikan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di

[40] Bank Indonesia, dalam https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/seki/Documents/5_Pinjaman%20yang%20diberikan_Indo.pdf, diakses pada Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Provinsi Banten tahun 2010-2015.[41] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Dewi Kuntiarti adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi dan upah minimum untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Dewi Kuntiarti adalah, pada penelitian ini tidak menggunakan variabel jumlah penduduk. Pada penelitian ini menggunakan variabel belanja daerah dan pinjaman perbankan. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dita Dewi Kuntiarti menganalisis Provinsi Banten.

2. Dania Safia Safitri (2011) dengan penelitiannya yang berjudul ―Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009‖ dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai signifikan 0,0557, sedangkan PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan sebesar 0,04 terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Secara bersama-sama variabel inflasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.[42] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dania Safia Safitri adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dania Safia

[41] Dita Dewi Kuntiarti, ―Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), vii.
[42] Dania Safia Safitri, ―Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009‖ (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2011), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Safitri adalah, pada penelitian ini tidak menggunakan variabel PDRB. Pada penelitian ini menggunakan variabel UMP, belanja daerah dan pinjaman perbankan. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dania Safia Safitri menganalisis Provinsi Jawa Tengah.

3. Febriana Nur Rahmawati (2017) dengan penelitiannya yang berjudul ―Analisis Pengaruh PDRB, UMK dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2015‖ dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK berpengaruh signifikan positif, pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif, sedangkan PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di D.I Yogyakarta tahun 2010-2015.[43] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriana Nur Rahmawati adalah sama-sama menggunakan variabel upah minimum dan pengeluaran pemerintah daerah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriana Nur Rahmawati adalah, pada penelitian ini tidak menggunakan variabel PDRB. Pada penelitian ini menggunakan variabel inflasi dan pinjaman perbankan. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febriana Nur Rahmawati menganalisis Provinsi D.I Yogyakarta.

[43] Febriana Nur Rahmawati, ―Analisis Pengaruh PDRB, UMK dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di D.I Yogyakarta (Tahun 2010-2015)‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2017), xiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Shaila Riri Valentine (2018) dengan penelitiannya yang berjudul ―Pengaruh Inflasi, UMR, Jumlah Pariwisata dan PDRB Terhadap Pengangguran di DIY Tahun 2000-2015‖ dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, artinya apabila inflasi meningkat, maka pengangguran di DIY akan menurun. UMR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, artinya apabila UMR meningkat, maka pengangguran di DIY akan turun. Jumlah pariwisata berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap pengangguran, artinya apabila jumlah pariwisata meningkat maka pengangguran di DIY akan menurun. PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran, artinya apabila PDRB meningkat maka pengangguran di DIY akan turun.[44] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Shaila Riri Valentine adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi dan upah minimum untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Shaila Riri Valentine adalah, pada penelitian ini tidak menggunakan variabel jumlah pariwisata dan PDRB. Pada penelitian ini menggunakan variabel belanja daerah dan pinjaman perbankan. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shaila Riri Valentine menganalisis Provinsi DIY.

[44] Shaila Riri Valentine, ―Pengaruh Inflasi, UMR, Jumlah Pariwisata dan PDRB Terhadap Pengangguran di DIY Tahun 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tengkoe Sarimuda RB (2014) dengan penelitiannya yang berjudul ‒Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011‖ dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMK, inflasi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan secara parsial, PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2007-2011. Dan inflasi ataupun investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.[45] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tengkoe Sarimuda RB adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi dan upah minimum untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tengkoe Sarimuda RB adalah, pada penelitian ini tidak menggunakan variabel PDRB dan investasi. Pada penelitian ini menggunakan variabel belanja daerah dan pinjaman perbankan. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tengkoe Sarimuda RB menganalisis Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.
6. Nadia Nailul Muna (2017) dengan penelitiannya yang berjudul ‒Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Pada Provinsi-Provinsi Yang Terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2010-2016‖ dengan hasil

[45] Tengkoe Sarimuda, ‒Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011‖, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* No.2, (Agustus 2014), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, untuk variabel jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Sumatera.[46] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Nailul Muna adalah sama-sama mencari faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Nailul Muna adalah, pada penelitian ini tidak menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, penerimaan pemerintah, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia. Pada penelitian ini menggunakan variabel inflasi, upah minimum provinsi, belanja daerah dan pinjaman perbankan. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Nailul Muna menganalisis Pulau Jawa dan Sumatera.

7. Riza Firdhania (2017) dengan penelitiannya yang berjudul ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember‖ dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Variabel inflasi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di

[46] Nadia Nailul Muna, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Pada Provinsi-Provinsi Yang Terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2010-2016‖ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017), xxii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Jember. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Secara simultan hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.[47] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riza Firdhania adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi dan upah minimum untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riza Firdhania adalah, pada penelitian ini tidak menggunakan variabel indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini menggunakan variabel belanja daerah dan pinjaman perbankan. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riza Firdhania menganalisis Kabupaten Jember.

[47] Riza Firdhania, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember‖, *e-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol. IV, (2017), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Konseptual

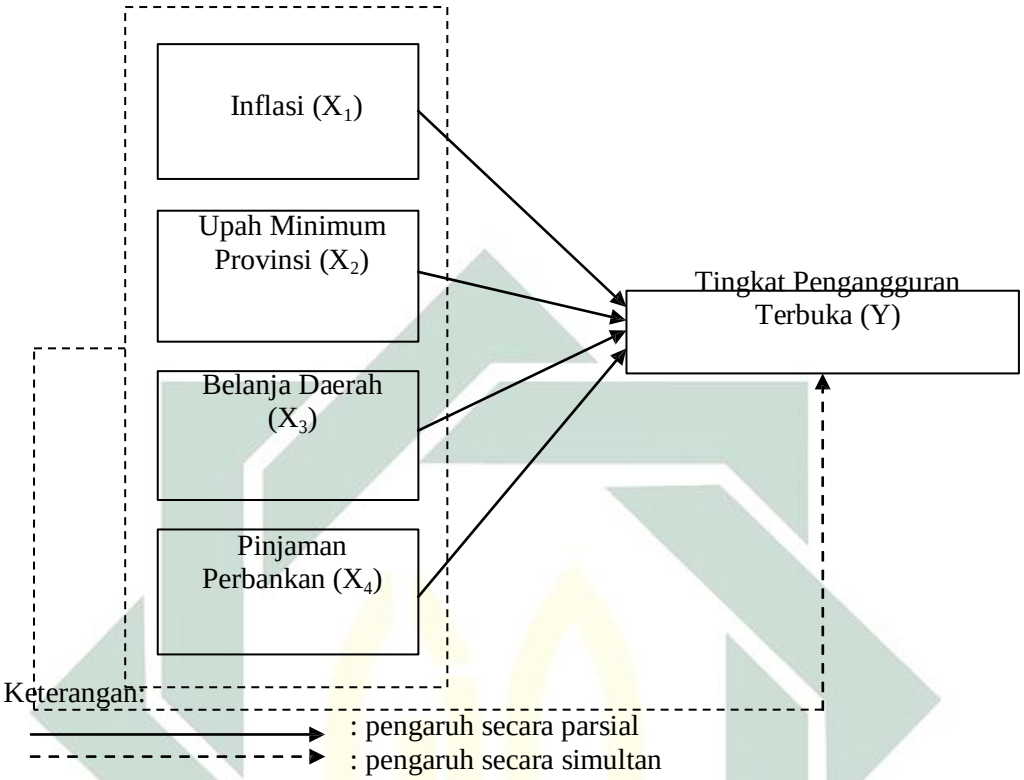

Dapat dilihat dalam bagan kerangka konseptual diatas, menunjukkan bahwa terdapat 4 variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (Y) di Jawa Timur, diantaranya Inflasi (X_1), upah mininum provinsi (X_2), belanja daerah (X_3) dan pinjaman perbankan (X_4). Keempat variabel ini memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Variabel pertama adalah inflasi, inflasi diduga memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh A.W. Philips, inflasi diasumsikan sebagai kenaikan permintaan dan harga. Jika permintaan meningkat maka sesuai dengan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan, jumlah produksi akan meningkat pula. Peningkatan produksi memaksa produsen menambah jumlah tenaga kerja agar dapat memenuhi permintaan. Hal ini terbukti jika inflasi meningkat maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun, keduanya memiliki hubungan yang negatif.

Variabel kedua adalah upah minimum, upah minimum diduga memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dilihat dari sisi perusahaan, meningkatnya upah yang ditetapkan pemerintah daerah akan meningkatkan biaya produksinya. Maka untuk menyeimbangkan keadaan ini agar usahanya dapat terus berjalan, perusahaan akan berusaha mengefisiensikan biaya produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga ketika upah meningkat, maka jumlah pengangguran akan meningkat. Keduanya memiliki hubungan yang positif.

Variabel ketiga adalah belanja daerah, belanja daerah diduga memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Belanja daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat, salah satu diantaranya adalah layanan kesehatan dan pendidikan. Ketika belanja daerah semakin meningkat maka tingkat kesehatan dan pendidikan seseorang juga ikut meningkat sehingga dapat mengurangi pengangguran. Keduanya memiliki hubungan yang negatif.

Variabel keempat adalah pinjaman perbankan, yang dimaksud dengan pinjaman perbankan adalah pinjaman yang telah diberikan oleh bank kepada sektor swasta domestik dan berkewajiban untuk mengembalikan. Variabel pinjaman perbankan dalam sepengetahuan peneliti masih belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak digunakan dalam penelitian sejenis ini. Alasan peneliti menggunakan variabel ini adalah adanya dugaan bahwa pemberian pinjaman dari perbankan khususnya untuk lapangan usaha memiliki hubungan dengan tingkat pengangguran terbuka. Ketika pinjaman yang diberikan tinggi maka kualitas sumberdaya manusia akan meningkat, begitu sebaliknya, ketika pinjaman yang diberikan rendah maka kualitas sumberdaya manusia akan menurun. Pinjaman yang digunakan untuk memulai usaha dapat membuka lapangan pekerjaan. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja, dampaknya tingkat pengangguran terbuka akan menurun. Jadi keduanya memiliki hubungan yang negatif.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual dan analisis teori yang mendasar, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan diduga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah berupa angka-angka dan pengolahannya melalui statistik.[48] Penelitian ini atas perubahan dan perkembangan yang menitik beratkan pada aspek kuantitatif atau ukuran harus mencakup 2 buah variabel, yakni variabel terikat dan variabel bebas.[49]

Definisi lain menurut Sugiyono (2012), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, yang mana dalam pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.[50]

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil periode waktu dari tahun 2013 hingga 2018 dan mengambil objek penelitian di Provinsi Jawa Timur.

---

[48] Moh. Sidiq Priadana, Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 15.
[49] Ibid, 169.
[50] Dita Dewi Kuntiarti, ‗Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perilaku empiris variabel-variabel yang diteliti. Dalam mengestimasi populasi tersebut digunakan sampel data kabupaten/kota variabel-variabel yang diteliti dalam periode 2013-2018 di Provinsi Jawa Timur.

D. Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu sifat yang dapat mempunyai beberapa nilai. Jika diekspresikan secara berlebihan, variabel merupakan sesuatu yang bervariasi. Variabel biasanya diekpresikan dalam bentuk simbol atau lambang (biasanya digunakan simbol x dan y).[51]

Cara yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengelompokkan variabel adalah dengan membeda-bedakan antara variabel dependen dan independen. Variabel independen (variabel bebas) adalah jenis variabel yang dianggap sebagai penyebab munculnya variabel dependen atau dengan kata lain variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.[52]

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel terikat dan empat variabel bebas. Adapun variabel-variabel yang dimaksud sebagai berikut:

---

[51] Arfan Ikhsan, Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 64.
[52] Ibid, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka (Y).

2. Variabel Bebas

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Inflasi (X_1)
b. Upah Minimum Provinsi (X_2)
c. Belanja Daerah (X_3)
d. Pinjaman Perbankan (X_4)

E. Definisi Operasional

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat pengangguran terbuka kab/kota di Jawa Timur tahun 2013-2018, dengan satuan nilai persen.

2. Inflasi (X_1)

Inflasi dalam penelitian ini merupakan suatu proses kenaikan harga-harga umum sejumlah barang dan jasa secara terus menerus dalam waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi kab/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 dengan satuan persen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Upah Minimum (X_2)

Upah minimum Jawa Timur adalah upah minimum yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang kemudian diberlakukan di wilayah tersebut. Data upah minimum yang digunakan diwakili oleh data upah minimum kab/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2018, dengan merubah satuan dari rupiah dijadikan persen.

4. Belanja Daerah (X3)

Belanja daerah diartikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang berdasarkan atas prinsip merata, adil dengan tujuan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa membedakan statusnya. Data belanja daerah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data belanja daerah kab/kota di Jawa Timur tahun 2013-2018, dengan nilai satuan rupiah yang kemudian diubah menjadi persen.

5. Pinjaman Perbankan (X_4)

Pinjaman perbankan yang dimaksud adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada sektor swasta domestik. Data yang digunakan dalam penelitian ini terkait pinjaman perbankan adalah data posisi pinjaman yang diberikan (rupiah) oleh Bank Umum dan BPR kab/kota di Provinsi Jawa Timur kepada sektor swasta berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2013-2018, dengan nilai satuan rupiah yang tela diubah menjadi persen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pengumpul data (Kuncoro, 2003).[53] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan data yang telah dikumpulkan dalam beberapa objek dengan beberapa waktu (Suliyanto, 2011).[54]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data publikasi resmi yang berasal dari lembaga pemerintah, diantaranya:

a. Badan Pusat Statistik Indonesia, website https://www.bps.go.id/
b. Badan Pusat Statistik Jawa Timur, website https://jatim.bps.go.id/
c. Bank Indonesia, website https://www.bi.go.id/
d. Disnakertrans Jatim, website https://disnakertrans.jatimprov.go.id/

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas merupakan akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran responden, meskipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda. Thorndike dan Hagen (1995) membagi validitas dalam dua jenis, diantaranya validitas langsung dan validitas derivatif.

[53] Dita Dewi Kuntiarti, ‒Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 41.
[54] Ibid, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Validitas langsung adalah jenis validitas yang bergantung pada analisa rasional dan putusan profesi, sedangkan validitas derivatif merupakan jenis validitas yang bergantung pada pembuktian statistik dan empiris.[55]

Kerlinger (1973) membagi validitas menjadi tiga jenis, pertama *content validity* yang merupakan pengukuran instrumen yang mengandung butir-butir pertanyaan yang memadai dan representatif untuk mengukur *construk* sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Kedua, *criterion-related validity* merupakan cerminan kerahasiaan dari ukuran yang digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi. Misalnya ketika peneliti ingin memprediksi atau mengestimasi kebenaran dari perilaku saat ini, maka uji ini digunakan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara skor yang diperoleh dari penggunaan instrumen baru dengan skor dari penggunaan instrumen lain yang telah ada sebelumnya dan memiliki kriteria yang relevan. Ketiga, *construk validity* adalah abstraksi dari generalisasi khusus dan merupakan suatu tahap yang diciptakan khusus untuk kebutuhan ilmiah dan memiliki pengertian terbatas. Dalam mengevaluasi *construk validity*, kita mempertimbangkan teori dan instrumen yang digunakan.[56]

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menyangkut ketetapan suatu alat ukur. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari

[55] Arfan Ikhsan, Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 210.
[56] Ibid, 210-212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

variabel. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu.[57]

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi. Metode dokumentasi dalam pengumpulan data adalah mencari dan mendapatkan data melalui prasasti-prasasti, naskah-naskah kearsipan, data gambar dan lain sebagainya (Supardi, 2005).[58] Data dalam penelitian ini diperoleh melalui lembaga-lembaga sumber data sekunder.

Data yang telah didapat yaitu data pengangguran terbuka, inflasi, belanja daerah dan pinjaman perbankan dari Badan Pusat Statistik, sedangkan upah minimum kabupaten/kota didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur. Dari semua data yan didapatkan yakni 8 kabupaten/kota di Jawa Timur diantaranya Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota madiun dan Kota Surabaya, selanjutnya data diketik ulang dalam Excel untuk diolah ke dalam Eviews. Pengetikan data panel dengan format urutan semua kabupaten dari tahun 2013-2018 baru kemudian dilanjut dengan kabupaten lain begitu seterusnya.

[57] Ibid, 213.
[58] Dita Dewi Kuntiarti, ‗Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan data gabungan antara *time series* dan *cross section*. Tujuan penggunaan dari data panel adalah untuk memperbanyak observasi guna memenuhi keperluan jumlah observasi minimum.[59]

Persamaan analisis data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Y}_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	: Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam persen)
X_1	: Inflasi (dalam persen)
X_2	: Upah minimum provinsi (dalam persen)
X_3	: Belanja daerah (dalam persen)
X_4	: Pinjaman perbankan (dalam persen)
β0	: Konstanta
β1, β2, β3, β4	: Koefisien variabel independen
e_{it}	: Komponen error di waktu t untuk unit *cross section* i
i	: Data *cross section* kab/kota
t	: Data *time series* 2013 sampai dengan 2018

[59] Shochrul R. Ajija, Cara Cerdas Menguasai Eviews (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan analisis regresi dengan data panel pada penelitian ini memiliki 3 model estimasi yang ditawarkan. Berikut ini 3 model estimasi dari data panel:

a. *Pooled least square* (PLS), mengestimasi panel dengan menggunakan metode OLS. Metode ini secara sederhana menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section*.[60]
b. *Fixed effect* (FE), dengan menambahkan model dummy pada data panel. Metode FE memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted-variables*, yang mungkin akan membawa perubahan pada intercept *time series* atau *cross section.* Dengan menambahkan variabel dummy untuk memberi izin adanya perubahan pada intercept ini.[61]
c. *Random effect* (RE), metode ini memperhitungkan error dari data panel dengan metode *least square*. Metode RE memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan mempertimbangkan error dari *cross section* dan *time series*. RE juga menggunakan variansi dari estimasi *generalized least square* (GLS).[62]

Untuk menentukan metode manakah yang paling cocok digunakan diantara ketiga metode atau model diatas, maka diperlukan pengujian lebih lanjut. Adapun langkah menentukannya adalah melalui uji chow, uji hausman serta uji LM.

[60] Shochrul R. Ajija, Cara Cerdas Menguasai Eviews (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 51.
[61] Ibid, 51-52.
[62] Ibid, 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penentuan Model Estimasi Data Panel

Keuntungan dalam penggunaan regresi dengan data panel adalah mampu menyediakan data dengan jumlah yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, dapat mengatasi masalah yang timbul ketika adanya masalah penghilangan variabel.[63]

Dalam rangka melakukan analisis terhadap pengaruh inflasi, UMP, belanja daerah dan pinjaman perbankan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 dengan menggunakan data panel maka dalam hal ini dilakukan uji chow, uji hausman dan uji LM.[64]

a. Uji Chow

Merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah teknik pada regresi data panel baik menggunakan *fixed effect model* atau *common effect model* (PLS). Dasar dalam pengambilan keputusan menggunakan uji chow adalah jika H_0 diterima maka digunakan *model common effect* dan jika H_0 ditolak maka digunakan *model fixed effect*.[65]

Jika nilai probabilitas dari *chi-squared* < 0.05 (signifikansi 5%) maka model yang digunakan adalah *fixed effect model*. Tetapi, jika

[63] Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 353-354.
[64] Dita Dewi Kuntiarti, ‒Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 44.
[65] Ibid, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai probabilitas dari *chi-squared* > 0.05 maka model yan harus digunakan adalah *common effect model*.[66]

b. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih *fixed effect model* atau *random effect model*. Dasar dalam pengambilan keputusan adalah menggunakan uji hausman, jika H_0 ditolak maka digunakan *fixed effect model*. Akan tetapi, jika H_0 diterima maka digunakan *random effect model*.[67]

Jika nilai probabilitas < 0.05 (signifikansi 5%) maka model yang digunakan adalah *fixed effect model*. Tetapi, jika nilai probabilitas > 0.05 maka model yang harus digunakan adalah random effect model.[68]

c. Uji Lagrange Multiplier (Uji LM)

Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model PLS digunakan lebih baik daripada metode random effect. Uji LM didasarkan pada nilai chi-squares dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM > dibandingkan dengan nilai kritis statistik *chi-squares* maka hipotesis nol ditolak. Artinya, estimasi yang tepat digunakan untuk model regresi data panel adalah metode *random effect* daripada metode PLS. Namun, jika nilai LM < nilai kritis statistik *chi-*

[66] Dita Dewi Kuntiarti, ‗Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 44.
[67] Ibid, 44-45.
[68] Ibid, 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

squares maka hipotesis nol diterima dan kita gunakan metode PLS dalam regresi data panel.[69]

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas biasanya digunakan ketika jumlah observasi kurang dari 30, untuk mengetahui apakah error term mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasinya lebih dari 30, biasanya uji ini tidak perlu dilakukan. Sebab distribusi sampling error term telah mendekati normal.[70] Akan tetapi jika ingin tetap melakukan uji ini untuk memastikan apakah data berdistribusi normal atau tidak, juga bisa dilakukan meskipun observasinya lebih dari 30.

Uji normalitas dengan e-views bisa dilakukan dengan Uji Jarque-Berra (JB test).[71] Dalam pengujian dengan software e-views, normalitas dapat diketahui dengan melihat probabilitas JB test. Jika probabilitas > 0.05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal, sedangkan jika probabilitas < 0.05 maka data berdistribusi tidak normal.[72]

b. Uji Multikolinearitas

Multikolineritas berarti adanya hubungan linier yang pasti, diantaranya beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model

[69] Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 363-364.
[70] Shochrul R. Ajija, Cara Cerdas Menguasai Eviews (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 42.
[71] Ibid, 42.
[72] Dita Dewi Kuantiarti, ‒Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

regresi. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi dari masin-masing variabel bebas > 0.08, maka diduga terkena multikolinearitas.[73]

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak mempunyai atau tidak memiliki varians yang sama.[74] Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama dengan melihat pola residual dari hasil estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Tetapi, jika residual membentuk suatu pola tertentu, maka hal tersebut mengindikasi adanya heteroskedastisitas.[75]

Kedua, untuk membuktikan dugaan pada uji pertama, maka dilakukan uji kedua dengan melihat nilai probabilitas residabs nya. Jika nilai probbalitas residabs > 0.05 maka data dapat dikatakan tidak terkena gangguan heteroskedastisitas.[76] Namun, jika nilai probabilitas dari residabs < 0.05 maka data diterindikasi gangguan heteroskedastisitas.

[73] Shochrul R. Ajija, Cara Cerdas Menguasai Eviews (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 35.
[74] Ibid, 36.
[75] Ibid, 36.
[76] Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi (atau biasa disebut otokorelasi) menunjukkan korelasi diantara variabel yang diurutkan menurut waktu atau ruang.[77] Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi, dapat dilakukan dengan:

Pertama, memperhatikan nilai Durbin Watson (DW) statistik. Kriteria dari uji ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Keputusan	Kriteria	Hipotesis Nol
Ada Autokorelasi Positif	Tolak	0 < d < dL
Tidak Ada Autokorelasi Positif	Tidak Ada Keputusan	dL < d < dU
Ada Autokorelasi Negatif	Tolak	4-dL < d < 4
Tidak Ada Autokorelasi Negatif	Tidak Ada Keputusan	4-dU < d < 4
Ttidak Ada Autokorelasi	Jangan Tolak	dU < d < 4-dU

Tabel 3.1 Uji Durbin Watson Menurut Gujarati (2012)[78]

3. Uji Hipotesis Statistik

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat [proporsi (persen) variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas]. Nilai R^2 berkisar diantara 0 sampai 1, semakin mendekati 1 maka semakin baik.[79]

[77] Shochrul R. Ajija, Cara Cerdas Menguasai Eviews (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 40.
[78] Dita Dewi Kuntiarti, ‗Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2010-2015‖ (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 46.
[79] Shochrul R. Ajija, Cara Cerdas Menguasai Eviews (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Uji Statistik F

Sedangkan uji F atau uji model secara keseluruhan dilakukan untuk melihat apakah diantara semua koefisien regresi berbeda dengan nol atau model diterima.[80]

Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai dari hasil uji F-statistik pada hasil regresi dengan F-tabel. Jika nilai dari F-stat > F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Begitu sebaliknya, jika F-stat < F-tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.[81]

c. Uji Statistik t

Uji t adalah pengujian terhadap koefisien dari variabel penduga atau variabel bebas. Koefisien penduga perlu berbeda dari nol secara signifikan atau *p-value* sangat kecil.[82]

Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai dari hasil uji t-statistik pada hasil regresi dengan t-tabel. Jika nilai dari t-stat > t-tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Begitu sebaliknya, jika t-stat < t-tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.[83]

[80] Shochrul R. Ajija, Cara Cerdas Menguasai Eviews (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 34.
[81] Ibid, 34.
[82] Ibid, 34.
[83] Ibid, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hipotesis

H_1 = menunjukkan bahwa variabel inflasi (X_1) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y).

H_2 = menunjukkan bahwa variabel upah minimum (X_2) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y).

H_3 = menunjukkan bahwa variabel belanja daerah (X_3) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y).

H_4 = menunjukkan bahwa variabel pinjaman perbankan (X_4) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y).

H_5 = menunjukkan bahwa variabel inflasi (X_1), upah minimum (X_2), belanja daerah (X_3) dan pinjaman perbankan (X_4) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Secara geografis Provinsi Jawa Timur terletak di antara 111^0 BT dan 114^04 BS, dengan luas wilayah 47.963 km^2, yang meliputi luas daratan 88,70 persen atau 42.541 km^2 serta luas kepulauan madura 11,30 persen atau 5.422 km^2. Iklim di Jawa Timur adalah iklim tropis lembab dengan curah hujan rata-rata pada setiap tahunnya adalah 2.100 mm. Suhu di daerah ini berkisar antara 18^0 – 35^0 celcius.[84] Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk yang ada di Jawa Timur pada tahun 2017 adalah 39.292.972 jiwa.

Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur[85]

[84] Sekilas Jawa Timur, dalam https://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/sekilas-jawa-timur, diakses pada Februari 2020.
[85] Peta Provinsi Jawa Timur, dalam https://www.abundancethebook.com/peta-jawa-timur/, diakses pada Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur diantarnya sebagai berikut:

Sebelah Utara = Laut Jawa

Sebelah Selatan = Samudera Indonesia

Sebelah Timur = Selat Bali

Sebelah Barat = Jawa Tengah

Secara administratif, Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, yang ber-ibukota di Kota Surabaya. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), meliputi Bakorwil I Madiun diantaranya Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro, diantaranya Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan. Bakorwil III Malang, diantaranya Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.[86]

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur yang akan diperingati secara resmi setiap tahun baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Gambaran Umum Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Jawa Timur

Pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan (dikarenakan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan), serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan akan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut data tingkat pengangguran terbuka di 8 kab/kota yang ada di Jawa Timur dari tahun 2013 hingga 2018:

[86] Sekilas Jawa Timur, dalam https://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timue/sekilas-jawa-timur, diakses pada Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Jember	3,94	4,64	4,77	5,21	5,16	4,09
Kab Banyuwangi	4,65	7,17	2,55	4,43	3,07	3,67
Kab Sumenep	2,56	1,01	2,07	2,00	1,83	1,79
Kota Kediri	7,92	7,66	8,46	8,22	4,68	3,63
Kota Malang	7,73	7,22	7,28	6,91	7,22	6,79
Kota Probolinggo	4,48	5,16	4,01	3,96	3,42	3,64
Kota Madiun	6,57	6,93	5,10	5,12	4,26	3,85
Kota Surabaya	5,32	5,82	7,01	7,29	5,98	6,12

Tabel. 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka 8 Kab/Kota di Jawa Timur (dalam persen)[87]

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka di 8 kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa nilainya fluktuatif. Nilai tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada di Kota Kediri pada tahun 2015 sebesar 8,46, sedangkan nilai tingkat pengangguran terbuka terendah berada di Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 sebesar 1,01.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur menurut Badan Pusat Statistik dapat diamati dari dua aspek, diantaranya aspek ketersediaan (supply) dan aspek kebutuhan (demand). Idealnya kedua aspek ini berada pada posisi yang seimbang, jadi jumlah kebutuhan akan tenaga kerja dapat dipenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia. Akan tetapi, kondisi ini masih belum dapat tercapai hingga tahun 2018.

3. Gambaran Umum Inflasi (X_1) di Jawa Timur

Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi dari 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 hingga 2018:

[87] Tingkat Pengangguran Terbuka, dalam https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/11/05/432/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-2001---agustus-2018.html, diakses pada Februari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Jember	7,21	7,52	2,31	1,93	3,52	2,95
Kab Banyuwangi	7,10	6,59	2,15	1,91	3,17	2,04
Kab Sumenep	6,62	8,04	2,62	2,19	3,40	2,82
Kota Kediri	8,05	7,49	1,71	1,30	3,44	1,97
Kota Malang	7,92	8,14	3,32	2,62	3,75	2,98
Kota Probolinggo	7,98	6,79	2,11	1,53	3,18	2,18
Kota Madiun	7,52	7,40	2,75	2,25	4,78	2,71
Kota Surabaya	7,52	7,90	3,43	3,22	4,37	3,03

Tabel 4.2 Inflasi 8 Kab/Kota di Jawa Timur (dalam persen)[88]

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya angka inflasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Kenaikan terjadi di tahun 2017, faktor utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi adalah kenaikan harga BBM non subsidi, mulai dari pertalite hingga pertamax turbo. Adanya kenaikan BBM ini menjadi pemicu harga sandang dan pangan juga ikut naik, sehingga inflasi tidak dapat dibendung lagi kenaikannya. Sedangkan penurunan terjadi di tahun 2015, 2016 serta 2018. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Malang pada tahun 2014 yang mencapai 8,14 dan inflasi terendah terjadi di Kota Kediri tahun 2016 sebesar 1,30.

4. Gambaran Umum Upah Minimum Provinsi (X_2) di Jawa Timur

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum kab/kota di Jawa Timur. Upah Minimum kab/kota atau biasa disebut dengan UMK adalah nilai upah terendah yang berlaku di kab/kota tersebut pada tahun berlaku.

[88] Laju Inflasi, dalam https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=indikator+ekonomi&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan, diakses Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Jember	1.091	1.270	1.460	1.629	1.763	1.916
Kab Banyuwangi	1.086	1.240	1.426	1.599	1.730	1.881
Kab Sumenep	965	1.090	1.253	1.398	1.513	1.645
Kota Kediri	1.128	1.165	1.339	1.494	1.617	1.758
Kota Malang	1.340	1.587	1.882	2.099	2.272	2.470
Kota Probolinggo	1.103	1.250	1.437	1.603	1.735	1.886
Kota Madiun	953	1.066	1.250	1.394	1.509	1.640
Kota Surabaya	1.740	2.200	2.710	3.045	3.296	3.583

Tabel 4.3 UMK 8 Kab/Kota di Jawa Timur (dalam ribu rupiah)[89]

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa upah minimum selama tahun 2013 sampai dengan 2018 dari masing-masing kabupaten/kota mengalami kenaikan. Kenaikan upah minimum tertinggi di Kota Surabaya dari Rp 2.200.000,- menjadi Rp 2.710.000,- dan kenaikan upah terendah berada di Kota Kediri dari Rp 1.128.400,- hanya menjadi Rp 1.165.000,-. Salah satu penyebab peningkatan upah kabupaten/kota adalah karena menyesuaikan dengan tingkat inflasi agar para pekerja tidak mengalami penurunan kesejahteraan.

5. Gambaran Umum Belanja Daerah (X_3) di Jawa Timur

Dalam memajukan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengeluaran pemerintah daerah digunakan untuk membelanjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Rincian pengeluaran pemerintah daerah

[89] UMK Kab/Kota, dalam http://disnakertrans.jatimprov.go.id/category/umk/, diakses Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat dilihat pada APBD.[90] Belanja pemerintah daerah dibagi atas belanja langsung dan tidak langsung. Berikut data belanja daerah dari 8 kab/kota di Jawa Timur pada tahun 2013 hingga 2018:

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Jember	2.347	2.464	3.083	2.979	3.558	3.775
Kab Banyuwangi	1.886	2.299	2.741	3.095	2.776	3.009
Kab Sumenep	1.421	1.607	1.958	2.048	2.059	2.230
Kota Kediri	871	979	1.120	1.484	1.269	1.286
Kota Malang	1.486	1.602	1.803	1.710	1.813	2.063
Kota Probolinggo	665	778	888	911	957	1.016
Kota Madiun	775	853	877	1.031	954	1.089
Kota Surabaya	5.052	7.049	6.490	7.153	7.912	9.117

Tabel 4.4 Belanja Daerah 8 Kab/Kota di Jawa Timur (dalam juta rupiah)[91]

Pada tabel diatas, tahun 2013 kab/kota yang memiliki belanja daerah tertinggi adalah Kota Surabaya dengan total belanja sebesar Rp 5 triliun dan yang terendah adalah Kota Probolinggo dengan belanja daerah sebesar Rp 665 miliar. Hingga tahun 2018 keadaannya masih sama dimana Kota Surabaya masih menduduki wilayah yang memiliki belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 9 triliun dan Kota Probolinggo masih menduduki daerah yang memiliki belanja daerah terendah yaitu sebesa Rp 1 triliun. Secara keseluruhan belanja daerah dari Kabupaten Sumenep dan Kota Probolinggo mengalami kenaikan secara terus menurus dari tahun 2013-2018. Sedangkan belanja daerah Kabupaten Jember, Kabupaten

[90] Febriana Nur Rahmawati, ―Aanalisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di D.I Yogyakarta‖ (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2017), 32.

[91] Belanja Daerah Kab/Kota, dalam https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan, diakses pada Februari 20120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyuwangi, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, dan Kota Surabaya nilainya fluktuatif.

6. Gambaran Umum Pinjaman Perbankan (X_4) di Jawa Timur

Pinjaman perbankan adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR kepada sektor swasta domestik berdasarkan lapangan usaha. Adapun data pinjaman perbankan dari 8 kab/kota di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Jember	4.405	5.023	5.266	5.569	6.610	7.689
Kab Banyuwangi	4.007	5.311	6.171	6.629	6.978	8.787
Kab Sumenep	1.016	1.117	1.181	1.339	1.524	1.958
Kota Kediri	9.101	1.2461	13.777	13.498	10.239	7.086
Kota Malang	7.339	8.453	7.657	8.754	10.286	10.540
Kota Probolinggo	1.265	1.395	1.347	1.378	1.356	1.509
Kota Madiun	1.289	1.322	1.608	1.596	1.919	1.886
Kota Surabaya	100.400	113.742	125.320	134.084	143.535	146.761

Tabel 4.5 Pinjaman Perbankan 8 Kab/Kota di Jawa Timur (dalam ribu rupiah)[92]

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pinjaman perbankan yang diberikan Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep dan Kota Surabaya nilainya terus meningkat dari tahun 2013-2018. Sedangkan pinjaman perbankan yang dikeluarkan Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota Madiun nilainya fluktuatif. Pinjaman yang diberikan oleh perbankan atau biasa disebut dengan kredit, nilai terbesar ada di Kota Surabaya. Pada tahun 2018 sebesar Rp 146 miliar dan nilai terendah ada di Kabupaten Sumenep tahun 2013 sebesar Rp 1 miliar.

[92] Pustaka Cetak Badan Pusat Statistik Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Data

1. Penentuan Model Estimasi Data Panel

Model estimasi data panel ada 3, diantaranya *common effect* (PLS), *fixed effect* dan *random effect*. Untuk menentukan model mana yang paling cocok digunakan dari ketiganya, dapat dilakukan melalui uji chow, uji hausman dan uji LM.

a. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk menentukan apakah regresi data panel lebih baik menggunakan *fixed effect* atau *common effect* (PLS). Cara menentukannya dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas *Chi-Squared.* Berikut hasil uji chow yang dilakukan oleh peneliti dengan software eviews 10 dalam penelitian ini:

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.388675	(7,36)	0.0013
Cross-section Chi-square	29.615843	7	0.0001

Gambar 4.2 Hasil Uji Chow

Berdasarkan hasil uji chow diatas, dapat dilihat nilai probabilitas dari *Chi-Squared* nya adalah 0.0001. Sama seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, jika nilai probabilitas dari *Chi- Squared* < 0.05 (signifikansi 5%) maka model yang digunakan adalah *fixed effect*. Karena hasil menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah *fixed effect* maka selanjutnya perlu dilakukan uji hausman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model mana yang paling cocok antara *fixed effect* atau *random effect*.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.502724	4	0.3422

Gambar 4.3 Hasil Uji Hausman

Sama dengan uji chow, nilai yang dilihat pada uji hausman adalah besarnya nilai probabilitas *Chi-Squared*. Dari hasil uji hausman nilai probabilitas *Chi-Squared* nya adalah 0.3422. Jika nilai probabilitas dari *Chi-Squared* < 0.05 maka model yang digunakan adalah *fixed effect*, sedangkan jika nilai probabilitas *Chi-Squared* > 0.05 maka model yang digunakan adalah *random effect*. Karena besarnya nilai probabilitas *Chi-Squared* dalam penelitian ini hasilnya menunjukkan angka 0.3422 (lebih besar dari 0.05) maka model yang digunakan adalah *random effect.*

c. Uji LM

Dalam penelitian ini, uji LM tidak dipakai karena pada hasil uji chow menunjukkan model yang digunakan adalah *fixed effect*. Uji LM digunakan ketika hasil dari uji chow menunjukkan pemakaian model *common effect*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Uji Asumsi Klasik

Setelah mengetahui bahwa model yang digunakan adalah model *random effect* maka langkah selanjutnya adalah dilakukan uji asumsi klasik, mulai dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal atau tidak normal. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai dari probabilitas JB > 0.05.

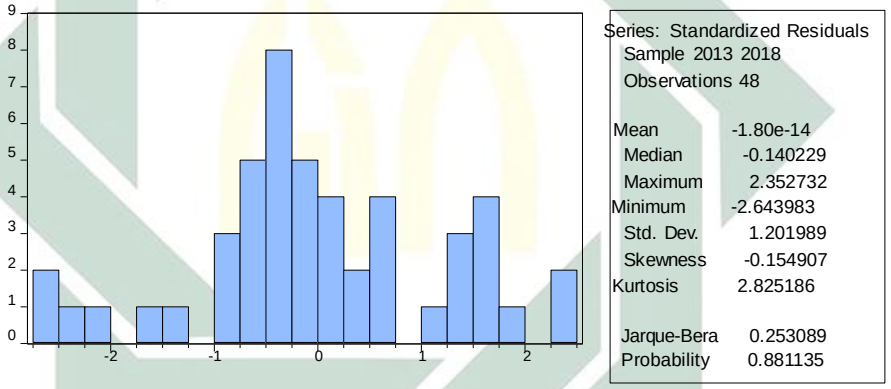

Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas

Dari hasil olahan eviews 10 untuk uji normalitas, menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas JB adalah 0.881135 yang berarti > 0.05 dan mendekati 1. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel bebas. Jika suatu model regresi mengalami gangguan multikolinearitas maka akan menyebabkan estimasi error term

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan varians koefisien regresi yang dihasilkan terlalu tinggi. Oleh karenya diperlukan pengujian mulrikolinearitas.

	X1_INFLASI	X2_UPAH	X3_BELANJA	X4_PINJAMAN
X1_INFLASI	1	-0.436	-0.120	0.010
X2_UPAH	-0.436	1	0.681	0.717
X3_BELANJA	-0.120	0.681	1	0.775
X4_PINJAMAN	0.010	0.717	0.775	1

Gambar 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Jika koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0.8 maka diduga terkena multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa nilai koefisien dari masing-masing variabel berada dibawah 0.8, jadi dapat disimpulkan terbebas dari gangguan multikolinearitas. Angka 1 dari masing-masing variabel diabaikan karena menunjukkan korelasi terhadap variabel itu sendiri.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterodkedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians error term antar variabel.

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/20/20 Time: 15:07
Sample: 2013 2018
Periods included: 6
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 48
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.387057	10.31123	-0.037537	0.9702
X1_INFLASI	0.067134	0.063043	1.064891	0.2929
X2_UPAH	-0.066619	1.826501	-0.036473	0.9711
X3_BELANJA	0.167379	0.932044	0.179583	0.8583
X4_PINJAMAN	-0.017683	0.473333	-0.037359	0.9704

Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen hasil probabilitas resabs > 0.05 maka tidak terkena gangguan heteroskedastisitas. Dapat dilihat nilai probabilitas masing-masing variabel independen adalah 0.2929, 0.9711, 0.8583, 0.9704 yang menunjukkan angka lebih dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena gangguan heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model memiliki korelasi dari waktu ke waktu. Cara mendeteksi adanya gangguan autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson (DW test).

Weighted Statistics

R-squared	0.394644	Mean dependent var	1.980179
Adjusted R-squared	0.338332	S.D. dependent var	1.214626
S.E. of regression	0.988013	Sum squared resid	41.97533
F-statistic	7.008145	Durbin-Watson stat	1.794028
Prob(F-statistic)	0.000195		

Gambar 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Besarnya nilai DW adalah 1.794028, untuk memudahkan dalam menyimpulkan apakah hasil terindikasi gangguan autokorelasi, maka dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

dL dU 4-dU 4-dL

Autokorelasi Positif	Tidak Dapat Diputuskan	Bebas Autokorelasi	Tidak Dapat Diputuskan	Autokorelasi Negatif

0 1.3619 1.7206 2.2794 2.6381 4

Gambar 4.8 Penentuan Autokorelasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai dL dan dU didapat dari tabel DW (dengan n=38 dan k=4). Nilai DW berdasarkan hasil uji autokorelasi model *random effect* adalah 1.794028, angka ini berada di daerah bebas autokorelasi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi bebas dari gangguan autokorelasi. Sehingga langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan interpretasi dari hasil yang didapatkan.

3. Analisis Regresi

Setelah model regresi bebas dari gangguan asumsi klasik, selanjutnya menginterpretasikan hasil regresinya:

Dependent Variable: Y_TPT
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/20/20 Time: 14:58
Sample: 2013 2018
Periods included: 6
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 48
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.22094	17.35857	3.238800	0.0023
X1_INFLASI	-0.071779	0.096746	-0.741928	0.4622
X2_UPAH	-4.907838	2.928481	-1.675899	0.1010
X3_BELANJA	-5.482301	1.908909	-2.871956	0.0063
X4_PINJAMAN	4.498131	0.916328	4.908865	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.394644	Mean depende	1.980179
Adjusted R-squared	0.338332	S.D. dependen	1.214626
S.E. of regression	0.988013	Sum squared resid	41.97533
F-statistic	7.008145	Durbin-Watson stat	1.794028
Prob(F-statistic)	0.000195		

Gambar 4.9 Hasil Regresi

Hasil diatas menunjukkan hasil regresi data panel dengan menggunakan metode *random effect* dengan eviews 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Uji F (Simultan)

Hasil dari probabilitas F-stat 0.000195 (dengan signifikansi 5%) menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-stat berada dibawah 0.05 atau dapat juga dilihat dari besarnya nilai F-stat, yakni 7.008145 dengan k=4 dan df=44, maka didapat nilai pada F-tabel 2.82 yang berarti nilai F- stat > dibandingkan dengan F-tabel. Hal ini menunjukkan uji F signifikan, artinya seluruh variabel independen (X_1/inflasi, X_2/upah minimum, X_3/belanja daerah, X_4/pinjaman perbankan) secara bersama- sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y/tingkat pengangguran terbuka).

b. Uji t (Parsial)

Sesuai hasil dari uji t yang menunjukkan bahwa variabel inflasi dan upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pinjaman perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur.

Pertama inflasi, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki nilai probabilitas 0.4622 (lebih besar dari 0.05) dan nilai t-statistik -0.741928 (lebih kecil dari nilai t-tabel 2.01537). Dengan nilai signifikansi 5% maka secara individu variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya meningkatnya inflasi akan diikuti dengan penurunan nilai tingkat pengangguran terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua upah minimum, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki nilai probabilitas 0.1010 (lebih bsar dari 0.05) dan nilai t-stat -1.675899 (lebih kecil dari nilai t-tabel 2.01537). Dengan nilai signifikan 5% maka secara individu variabel upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya meningkatnya upah minimum maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Ketiga belanja daerah, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel belanja daerah memiliki nilai probabilitas 0.0063 (lebih kecil dari 0.05) dan nilai t-stat -2.871956 (lebih besar dari nilai t-tabel 2.01537). Dengan nilai signifikan 5% maka secara individu variabel belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Artinya meningkatnya belanja daerah maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Keempat pinjaman perbankan, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pinjaman perbankan memiliki nilai prob 0.0000 (lebih kecil dari 0.05) dan nilai t-stat 4.908865 (lebih besar dari nilai t-tabel 2.01537). Dengan nilai signifikan 5% maka secara individu variabel pinjaman perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di JawaTimur. Artinya meningkatnya pinjaman yang diberikan oleh bank maka akan meningkatkan nilai tingkat pengangguran terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.394644. Dapat disimpulkan dari nilai koefisien determinasi, menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 39% sedangkan sisanya 61% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PEMBAHASAN

A. Pengaruh Secara Simultan Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah dan Pinjaman Perbankan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur

Dari hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, upah minimum, belanja daerah, dan pinjaman perbankan berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dapat dibuktikan dengan hasil pengujian nilai F statistik sebesar 7.008145 dengan k=4 dan n=44, jika dilihat nilai F tabelnya adalah 2.82. Maka nilai F statistik lebih besar daripada F tabel menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dapat juga dibuktikan dengan nilai probabilitas F statistik sebesar 0.000195 dengan signifikansi 5% atau 0.05 juga menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen diantaranya inflasi (X_1), upah minimum (X_2), belanja daerah (X_3) dan pinjaman perbankan (X_4) berpengaruh signifikan secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka (Y).

Nilai R-squared adalah 0.394644, yang artinya semua variabel independen didalam model berpengaruh secara bersama-sama sebesar 39% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengaruh Secara Parsial Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah dan Pinjaman Perbankan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur

Penggunaan teknik analisis data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2013 hingg 2018. Hasil dari analisis data panel dengan menggunakan eviews 10 metode *random effect* dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 56.22 – 0.07\ X_1 – 4.90\ X_2 – 5.48\ X_3 + 4.49\ X_4 + e_{it}$$

Pada hasil pengujian dan persamaan regresi diketahui bahwa nilai koefisien konstanta sebesar 56.22, menunjukkan besarnya nilai variabel dependen ketika variabel independen tidak ada perubahannya atau bernilai nol. Dari hasil olahan eviews uji parsial, dapat dijelaskan secara rinci hasilnya sebagai berikut:

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur

   Berdasarkan hasil pengolahan eviews 10, menunjukkan bahwa nilai t-statistik dari inflasi adalah -0.74 sedangkan probabilitas dari nilai t-statistiknya adalah 0.4622. Dibandingkan dengan signifikansi 0.05 atau 5% menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik > dibandingkan dengan nilai signifikansinya. Atau bisa juga dengan melihat nilai t-tabel pada k=4 dan df=44 menunjukkan nilai dari t-tabel adalah 2.01537, maka nilai t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

statistik < dibandingkan dengan t-tabel. Artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak, dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak signifikan pada 5% dan berhubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan koefisien regresi dari variabel inflasi adalah -0.07, hal ini berarti jika terdapat perubahan inflasi 1% maka akan menyebabkan perubahan pada tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.07%.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh A.W. Philips.

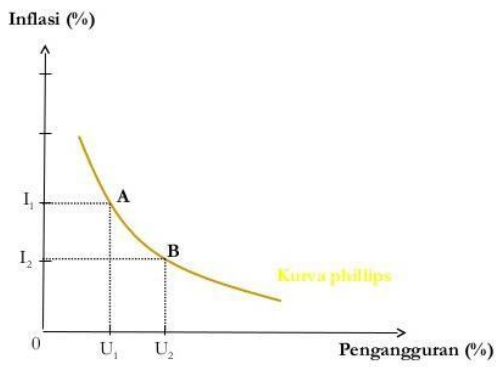

Gambar 5.1 Kurva Philips

A.W. Philips mengasumsikan bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, ketika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi), untuk memehuni permintaan tersebut, produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan cara menambah jumlah tenaga kerja (diasumsikan bahwa tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(inflasi), sehingga pengangguran berkurang. Karena nilainya tidak signifikan maka teori ini tidak dapat dibuktikan sepenuhnya untuk wilayah di Jawa Timur.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reni (2016) dan Dania (2011), hasilnya menunjukkan bahwa inflasi tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur

Hasil pengolahan eviews 10, menunjukkan bahwa nilai t –statistik dari upah minimum adalah -1.67 sedangkan probabilitas t-statistiknya adalah 0.1010. Dibandingkan dengan signifikansi 5% atau 0.05 menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik > dibandingkan nilai signifikansinya. Atau bisa juga dengan melihat nilai t-tabel pada k=4 dan df=44 menunjukkan nilai t tabel 2.01537 maka nilai t-statistik lebih kecil daripada t-tabel. Artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak, dapat disimpulkan bahwa upah minimum tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan koefisien regresi dari variabel upah minimum sebesar -4.90, hal ini berarti jika terdapat perubahan upah minimum 1% maka akan menyebabkan perubahan pada tingkat pengangguran terbuka sebesar 4.90%. Atau dengan kata lain jika upah minimum mengalami peningkatan sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 4.90%, begitu sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan teori Keynes, menganggap bahwa penurunan upah akan menurunkan daya beli masyarakat. Turunnya permintaan terhadap barang dan jasa akan mengakibatkan terjadinya penurunan kapasitas produksi yang artinya pengurangan jumlah tenaga kerja. Dengan demikian penurunan tingkat upah tidak dapat menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh (full employment), sehingga pengangguran akan bertambah.[93]

Peningkatan upah akan menambah biaya produksi, untuk tetap mempertahankan biaya produksi agar tidak semakin besar maka perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya. Pengurangan karyawan akan meningkatkan jumlah pengangguran. Teori ini tidak dapat dibuktikan di Jawa Timur karena probabilitas upah minimum menunjukkan bahwa upah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trianggono (2017), yang menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2010-2014 adalah tidak signifikan dan berhubungan negatif. Penelitian lain juga dilakukan oleh Lindhiarti (2014) yang menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di kota Malang tidak signifikan dan memiliki hubungan yang negatif.

[93] Bab II Tinjauan Teori, dalam http://eprints.umm.ac.id/37164/3/jiptummpp-gdl-rizkinasep-50874-3-babii.pdf, diakses pada Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur

Hasil pengolahan eviews 10, menunjukkan bahwa nilai t-statistik dari belanja daerah adalah -2.87 sedangkan probabilitas t-statistiknya adalah 0.0063. Dibandingkan dengan signifikansi 5% atau 0.05 menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik < nilai signifikansinya. Atau bisa juga dengan melihat nilai t-tabel pada k=4 dan df=44 menunjukkan nilai t-tabel 2.01537 maka nilai t-statistik > t-tabel. Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah memiliki hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan koefisien regresi dari variabel belanja daerah sebesar -5.48, hal ini berarti jika terdapat perubahan belanja daerah sebesar 1% maka akan menyebabkan perubahan pada tingkat pengangguran terbuka sebesar 5.48%. Atau dengan kata lain jika belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 1% maka tingkat pengangguran akan menurun sebesar 5.48%, begitu sebaliknya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Febriana (2017) bahwa pengeluaran atau belanja daerah berpengaruh secara signifikan negatif terhadap pengangguran. Belanja daerah dapat menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor perekonomian lain. Semakin besar belanja yang dilakukan untuk kegiatan produktif, maka semakin besar pula *multiplier effect* yang ditimbulkan. Penyebabnya adalah, ketika belanja yang dilakukan oleh daerah semakin besar maka dapat menstimulus kegiatan perekonomian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mampu mengurangi pengangguran dari adanya *multiplier effect* yang dihasilkan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2016) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif dengan pengangguran di Kalimantan Barat. Artinya jika belanja daerah meningkat maka tingkat pengangguran di Kalimantan Barat akan menurun. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aam (2018) yang menunjukkan bahwa pengeluaran atau belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Jawa Barat. Maka peningkatan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk program pembangunan yang bertujuan memperluas kesempatan kerja, akan menurunkan pengangguran terbuka di Jawa Barat.

Jadi, ketika belanja digunakan untuk belanja modal, seperti tanah. Kemudian didirikan sebuah pabrik, dengan adanya pabrik maka akan dibutuhkan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini yang kemudian mengurangi jumlah pengangguran.

4. Pengaruh Pinjaman Perbankan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur

Hasil dari pengolahan data eviews 10, menunjukkan bahwa nilai t-statistik dari pinjaman perbankan adalah 4.90 sedangkan nilai probabilitas t-statistiknya adalah 0.0000. Dibandingkan dengan signifikansi 5% atau 0.05 menunjukkan bahwa nilai probabilitas t-statistik < nilai statistiknya. Atau bisa juga dengan melihat nilai t-tabel pada k=4 dan df=44 menunjukkan nilai t-tabel 2.01537 maka nilai t statistik > t-tabel. Artinya H_0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditolak dan H_1 diterima dapat disimpulkan bahwa pinjaman perbankan memiliki hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan koefisien regresi dari variabel pinjaman perbankan sebesar 4.49, hal ini berarti jika terdapat perubahan pinjaman perbankan 1% maka akan menyebabkan perubahan pada tingkat pengangguran terbuka sebesar 4.49%. Atau dengan kata lain jika pinjaman perbankan mengalami peningkatan sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 4.49%, begitu sebaliknya.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa semakin besar pinjaman yang diberikan perbankan maka semakin besar pula pengangguran yang terjadi. Ketika sebuah industri atau usaha melakukan peminjaman pada sebuah bank, semakin besar pinjaman yang dilakukan maka semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan. Keadaan ini menimbulkan kredit macet, industri atau pengusaha tidak bisa melakukan cicilan pembayaran tepat waktu, sehingga untuk memperbaiki keadaan mereka akan mengurangi jumlah karyawannya. Jika keadaan ini tidak segera diatasi, maka yang terjadi adalah kebangkrutan. Dari sini terlihat adanya hubungan antara pinjaman yang diberikan perbankan dengan pengangguran.

Untuk memperkuat analisis peneliti, ada beberapa bukti pendukung terkait dengan hasil penelitian ini, diantaranya terjadi di Indonesia dan di Jawa Timur. Pertama, PT Sariwangi, karena tidak mampu membayar cicilan bunga yang ditentukan oleh bank, maka PT Sariwangi dinyatakan pailit. Sehingga banyak pegawainya yang kehilangan pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua terjadi di Kabupaten Bojonegoro yakni Pabrik Rokok 369 yang melakukan pinjaman pada sebuah bank untuk modal kerja (usaha). Ketika pabrik ini kewalahan dalam membayar cicilan hutangnya, maka pabrik ini juga dinyatakan pailit. Banyak pegawai yang kehilangan pekerjaan akibat kejadian tersebut.

Eti (2017) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa kredit untuk modal usaha yang diberikan berhubungan positif terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, meskipun hasilnya menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh secara tidak signifikan. Akan tetapi hubungan antara kredit yang diberikan dengan pengangguran adalah positif. Jadi ketika pinjaman yang diberikan meningkat maka pengangguran juga semakin besar.

C. Variabel Yang Paling Berpengaruh Antara Inflasi, Upah Minimum, Belanja Daerah dan Pinjaman Perbankan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari semua variabel independen mulai inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan, pengaruh masing-masing terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah 0.07%, 4.90%, 5.48% serta 4.49%. Variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur adalah variabel belanja daerah. Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, angka 5.48% menunjukkan bahwa dalam setiap perubahan 1% belanja daerah akan merubah 5.48% tingkat pengangguran. Hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya adalah negatif, yang berarti, setiap kenaikan belanja daerah akan diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan setiap penurunan belanja daerah maka akan diikuti dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel inflasi (X1) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif pada signifikansi 5% terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Jawa Timur. Nilai coefficient sebesar -0.071779 menunjukkan jika inflasi mengalami peningkatan 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 0.07%. Dan jika inflasi mengalami penurunan 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 0.07%. Variabel kedua, upah minimum (X2) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif pada signifikansi 5% terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Jawa Timur. Nilai coefficient sebesar -4.907838 menunjukkan jika upah minimum mengalami peningkatan 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 4.9%. Dan jika upah minimum mengalami penurunan 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 4.9%. Variabel ketiga, belanja daerah (X3) berpengaruh negatif dan signifikan pada 5% terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Jawa Timur. Nilai coefficient sebesar -5.482301 menunjukkan jika belanja daerah mengalami peningkatan 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 5.4%. Dan jika belanja daerah mengalami penurunan 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 5.4%. Dan variabel keempat, pinjaman perbankan (X4) berpengaruh positif dan signifikan pada 5% terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Jawa Timur. Nilai coefficient sebesar 4.498131 menunjukkan jika pinjaman perbankan mengalami peningkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1% maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 4.4%. Dan jika pinjaman perbankan mengalami penurunan 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 4.4%.

2. Sedangkan variabel inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F-statistik atau prob F-statistik sebesar 7.008145 atau 0.000195.
3. Variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur adalah variabel belanja daerah (X3). Besar pengaruhnya adalah 5.4% dengan hubungan negatif terhadap belanja daerah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait dengan permasalahan pengangguran yang ada di Jawa Timur. Salah satu kebijakan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dengan meningkatkan besarnya belanja daerah, karena kenaikan dari belanja daerah dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
2. Bagi Lembaga Perbankan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi produk layanan terkait pinjaman yang diberikan untuk modal usaha. Sehingga dengan adanya pinjaman yang diberikan mampu mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi penelitian yang akan datang, dengan menggunakan topik terkait pengangguran terbuka di Jawa Timur, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lain diluar model.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ajija, Shochrul R. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta : Salemba Empat, 2011.

Anas, Azwar. "Analisis Kebijakan Moneter dalam Menstabilkan Inflasi dan Pengangguran di Indonesia". Skripsi--Institut Pertanian Bogor, 2006.

Firdhania, Riza. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember". E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol. IV, 2017.

Franita, Riska. "Analisis Pengangguran di Indonesia". Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1, Desember, 2016.

Hasoloan, Jimmy. Ekonomi Moneter dan Perbankan. Yogyakarta : Deepublish, 2014.

Holifah. "Analisis Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Ikhsan, Arfan. Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.

Kuntiarti, Dita Dewi. "Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Kenaikan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten 2010-2015". Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

M, Faried Wijaya. Ekonomi Makro Aneka Model Baku. Yogyakarta : BPFE, t.t.

Muna, Nadia Nailul. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran pada Provinsi yang Terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2010-2016". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Naf'an. Ekonomi Makro. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.

Priadana, Moh. Sidik. Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.

Rahmawati, Febriana Nur. "Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wardiansyah, W. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-Provinsi Se-Sumatera)". E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, No. 1, Vol. 5, Januari-April, 2016.

Safitri, Dania Safia. "Pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009". Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2011.

Sarimuda, Tengkoe. "Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011". Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 2, Agustus, 2014.

Valentine, Shaila Riri. "Pengaruh Inflasi, UMR, Jumlah Pariwisata dan PDRB terhadap Pengangguran di DIY Tahun 2010-2015". Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2018.

Widarjono, Agus. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2013.

Widiyati, Reni. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota-Kota Provinsi Jawa Tengah". Naskah Publikasi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Pustaka Cetak Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

http://transparansi.jatimprov.go.id/dataView.php, diakses pada November 2019.

https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/1105/432/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-2001---agustus-2018.html, diakses pada November 2019.

https://www.bi.go.id/id/statistik/sekda/StatistikRegionalDetail.aspx?idprov=35, diakses pada November 2019.

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917, diakses pada November 2019.

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2018.html, diakses pada November 2019.

https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/04/02/379/inflasi-tahun-ke-tahun-jawa-timur-tahun-2003--maret-2018-persen-.html, diakses pada November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jatim/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2019.aspx, diakses pada November 2019.

https://www.bi.go.id/id/statistk/metadata/seki/Documents/5_Pinjaman%20yang%20diberikan_Indo.pdf, diakses pada Desember 2019.

https://www.kemenkeu.go.id/media/11213/buku-informasi-apbn-2019.pdf, diakses pada November 2019.

https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20100811092835269301854, diakses pada November 2019.

https://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/sekilas-jawa-timur, diakses pada Februari 2020.

https://www.abundancethebook.com/peta-jawa-timur/, diakses pada Februari 2020.

https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=indikator+ekonomi&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan, diakses Februari 2020.

http://disnakertrans.jatimprov.go.id/category/umk/, diakses Februari 2020.

https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan+pemerintah+kabupaten&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan, diakses pada Februari 20120.

http://eprints.umm.ac.id/37164/3/jiptummpp-gdl-rizkinasep-50874-3-babii.pdf, diakses pada Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id